

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018
TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. Pelabuhan Sei Jang No.3 Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

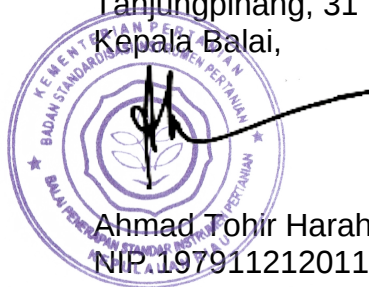
BPSIP Kepri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Kepri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP-Balitbangtan Kepri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjungpinang, 31 Desember 2024

Kepala Balai,



Ahmad Tohir Harahap, S.P.

NIP. 197911212011011007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. Pelabuhan Sungai Jang No.38

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Desember 2024
Kepala Balai,



Ahmad Tohir Harahap, S.P.
NIP.197911212011011007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.820.000 atau mencapai 116 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.170.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp3.530.507.923, atau mencapai 89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.951.174.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 13.092.984.350; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp493.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.092.491.350; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0; dan Kewajiban sebesar Rp11.058.300. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 13.092.984.350;.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.020.000; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.892.788.123; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.892.788.123; Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.800.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.887.968.123

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp13.453.525.225 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.887.968.123 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp9.318.975 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.525.687.923 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 13.081.926.050

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2024 dan 2023

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

URAIAN	CATATAN	2024			2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	4.170.000.	4.820.000.	116	9.610.000.
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					
BELANJA					
BELANJA PEGAWAI	B.2	1.499.356.000.	1.467.900.455.	98	1.322.115.329.
BELANJA BARANG	B.3	2.451.818.000.	2.062.607.468.	84	2.539.491.644.
JUMLAH BELANJA (B I + B II)		3.951.174.000.	3.530.507.923.	89	3.861.606.973

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU NERACA PER 31 Desember 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	TAHUN		%
		2024	2023	
ASET				
ASET LANCAR	C.1			
Persediaan	C.1.1	493.000	0	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		493.000	0	
ASET TETAP	C.2			
Tanah	C.2.1	4.568.076.000.	4.568.076.000	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.028.862.111.	4.149.582.111	(2,91)
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.719.728.860.	9.719.728.860	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	105.017.825.	105.017.825	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	22.280.000.	22.280.000	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6	(5.351.473.446.)	(5.110.028.671)	4,72
JUMLAH ASET TETAP		13.092.491.350.	13.454.656.125	(2,69)
ASET LAINNYA	C.3			
Aset Lain-lain	C.3.1	147.720.000.	88.825.000	66,30
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2	(147.720.000.)	(88.825.000)	66,30
JUMLAH ASET LAINNYA		0.	0	0
JUMLAH ASET		13.092.984.350.	13.454.656.125	(2,69)
KEWAJIBAN				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4	11.058.300.	1.130.900	877,83
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.1	11.058.300.	1.130.900	877,83
JUMLAH KEWAJIBAN	C.4.2	11.058.300.	1.130.900	877,83
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS	C.7	13.081.926.050.	13.453.525.225	(2,76)
Ekuitas	C.7.1	13.081.926.050.	13.453.525.225	(2,76)
JUMLAH EKUITAS		13.081.926.050.	13.453.525.225	(2,76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.092.984.350	13.454.656.125	(2,69)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.020.000.	420.000.
JUMLAH PENDAPATAN		1.020.000.	420.000.
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.477.649.455.	1.322.115.329.
Beban Persediaan	D.3.	16.139.550.	41.217.900.
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.218.892.009.	1.366.514.279.
Beban Pemeliharaan	D.5.	400.849.951.	270.593.793.
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	426.411.358.	889.401.372.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	352.845.800.	454.047.120.
JUMLAH BEBAN		3.892.788.123	4.343.889.793
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.891.768.123	4.343.469.793
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional	D.8	3.800.000.	9.190.000.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.8	3.887.968.123.	4.334.279.793.
SURPLUS/DEFISIT - LO		3.887.968.123.	4.334.279.793.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	13.453.525.225	13.935.808.045
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(3.887.968.123)	(4.334.279.793)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(9.318.975)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.1	(9.318.975)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.525.687.923	3.851.996.973
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(371.599.175)	(482.282.820)
EKUITAS AKHIR	E.6	13.081.926.050.	13.453.525.225.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,

Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

<i>Pendapatan LO</i>	(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
<i>Belanja</i>	(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	(4) Beban - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya
<i>Aset Lancar</i>	a. Aset Lancar - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

- lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.951.804.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau yang disebabkan adanya perubahan Nomenklatur Badan dan relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	4.170.000	4.170.000
Jumlah Pendapatan	4.170.000	4.170.000
Belanja		
Belanja Pegawai	1.584.356.000	1.499.356.000
Belanja Barang	2.600.448.000	2.451.818.000
Jumlah Belanja	4.184.804.000	3.951.174.000

Realisasi Pendapatan Rp4.820.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.820.000 atau mencapai 116 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.170.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	3.750.000	0	0,00
Pendapatan sarana dan prasarana sesuai Tusi	420.000	0	0,00
425131-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	1.020.000	100,00
425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.000.000	100,00
425191-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.800.000	100,00
Jumlah	4.170.000	4.820.000	116

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 49,84 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan berkurangnya penerimaan belanja pegawai tahun lalu dan ada penambahan pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Rincian pendatan adalah sebagai berikut:

Rincian penerimaan belanja pegawai tahun lalu

No	Nama	Jumlah Kelebihan Bulan	Besaran Tunjangan	Total Pembayaran Tunjangan
1	Zulfawilman, S. Pt	5	560.000	2.800.000

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000	0	100
Pendapatan Sewa tanah,gedung, dan bangunan	1.020.000	420.000	142,9
Pendapatan Lain-lain	2.800.000	9.190.000	-58,7
Jumlah	4.820.000	9.610.000	-49,84

Realisasi Belanja
Rp3.531.228.921

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau pada Semester II 2024 adalah sebesar Rp3.531.228.921 atau 89,36% dari anggaran belanja sebesar Rp3.951.174.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.499.356.000	1.468.621.453.	98
Belanja Barang	2.451.818.000	2.062.607.468.	84
Total Belanja Kotor	3.951.174.000	3.531.228.921	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(720.998)	0,00
Jumlah	3.951.174.000	3.530.507.9231	89,36

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sebesar 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023 terutama pada belanja barang tapi mengalami kenaikan pada Belanja Pegawai: Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat 1 orang pegawai yang Pindah ke BSIP Buah Tropika
2. Belanja pegawai uang lembur yang tidak ada pada tahun sebelumnya
3. Mutasi satu orang pegawai dari Karantin Pertanian
4. Pemblokiran sebagian anggaran belanja Tahun 2024 sampai bulan Mei 2024 yang berdampak pada berjalannya kegiatan

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	1.467.900.455.	1.322.115.329.	11,03
Belanja Barang	2.062.607.468.	2.539.491.644.	-18,87
Jumlah	3.951.174.000.	3.861.606.973.	-8,57

Belanja Pegawai
Rp1.467.900.455;

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.467.900.455; dan Rp1.322.115.329. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,03 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Mutasi pegawai dari Balai karantina pertanian Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) orang
2. Kenaikan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2024
3. Terdapat 5 orang pegawai yang diangkat jadi pejabat fungsional
4. Terdapat satu orang pegawai yang promosi jenjang jabatan jadi fungsional muda
5. Belanja uang lembur Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.468.621.453	1.323.040.831	11.00
Jumlah Belanja Kotor	1.468.621.453	1.323.040.831	11.00
Pengembalian Belanja Pegawai	720.998	925.502	-22.10
Jumlah Belanja	1.467.900.455	1.322.115.329	11.03

Nilai belanja pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp1.467.900.455 sedangkan nilai beban pegawai di Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.477.649.455 terdapat selisih sebesar Rp9.749.000 Selisih tersebut berasal dari SPM uang makan bulan desember yang dibayarkan pada januari 2025 dengan menggunakan anggaran belanja TA.2025

Uraian	Nominal	Keterangan
LRA	Rp1.467.900.455	
LO	Rp1.477.649.45	
Selisih	Rp9.749.000	Jurnal penyesuaian Belanja Uang Makan Desember 2024 dibayar di Januari 2025

Belanja Barang
Rp2.062.607.468

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.062.607.468 dan Rp 2.539.491.644 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami

penurunan sebesar 18,78% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Pemblokiran sebagian anggaran belanja Tahun 2024 sampai bulan Mei 2024 yang berdampak pada berjalannya kegiatan
2. Refocusing Anggaran TA.2024

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	653.975.860	660.052.051	-0,92
Belanja Barang Non Operasional	362.889.708	487.094.617	-25,50
Belanja Barang Persediaan	16.632.550	13.365.000	24,45
Belanja Jasa	201.848.041	218.984.811	-7,83
Belanja Pemeliharaan	400.849.951	270.593.793	48,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	426.411.358	889.401.372	-52,06
Jumlah Belanja Kotor	2.062.607.468.	2.539.491.644.	-18,78
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.062.607.468.	2.539.491.644.	-18,78

Realisasi belanja barang dan jasa di LRA lebih tinggi dibandingkan nilai beban belanja barang dan jasa di LO sebesar Rp314.000 Perbedaan tersebut merupakan belanja jasa langganan air kantor bulan Desember tahun 2023 yang dibayar pada tahun 2024, belanja jasa langganan air kantor bulan Desember tahun 2024 yang dibayar pada tahun 2025, dan perbedaan Belanja dan Beban Konsumsi 2024

Rincia Perbedaannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja air Desember 2023	1.130.900
2	Belanja air Desember 2024	1.309.300
	Selisih	-178.400
3	Belanja Konsumsi Persediaan 2024	16.632.550
4	Beban Konsumsi Persediaan 2024	16.139.550
	Selisih	493.000
	Selisih Total	314.000

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp493.000

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp493.000 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp493.000

C.1.1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp493.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Persediaan	2024	2023
Barang Konsumsi	493.000	0
Jumlah	493.000	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Pembelian persediaan berupa belanja barang konsumsi barang persediaan senilai Rp16.632.550 dan bahan baku senilai Rp0 selama TA. 2024. Untuk pemakaian atau beban persediaan pada TA. 2024 senilai Rp16.139.550 untuk barang konsumsi dan Rp0 untuk bahan baku, sehingga saldo persediaan sesuai pada tabel di atas.

Aset Tetap
Rp13.092.491.350

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.092.491.350 dan Rp13.454.656.125. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp4.568.076.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.568.076.000 dan Rp4.568.076.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	4.568.076.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	4.568.076.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	4.568.076.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai	Status
1	300	Ir. Sutami	264.000.000	Sertipikat hilang
2	250	Jl. Ir. Sutami	202.600.000	Sertipikat hilang
3	3.718	Pelabuhan Sungai Jang	3.836.976.000	Sesuai Ketentuan
4	200	Arif Rahman Hakim	264.500.000	Sesuai Ketentuan
Jumlah			4.568.076.000	

Seluruh aset tanah yang berjumlah empat bidang saat ini berada dalam penguasaan penuh. Dari keempat bidang tersebut, dua bidang tanah dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 2 dan 3 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena terdapat permasalahan berupa hilangnya sertifikat sebagai dokumen bukti kepemilikan.

Sementara itu, dua bidang tanah lainnya, yaitu dengan NUP 4 dan 5, telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua bidang tanah ini tercatat dengan baik dan tidak memiliki kendala terkait dokumen ataupun pengelolaan.

Peralatan dan
Mesin
Rp4.028.862.111

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.028.862.111 dan Rp4.149.582.111. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	4.149.582.111
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	120.720.000
Saldo Per 31 Desember 2024	4.028.862.111
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.847.496.625)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	181.365.486

Terdapat mutasi kurang pada peralatan dan mesin sebesar Rp120.720.000. hal ini disebabkan perubahan status aset menjadi Penghentian aset dari penggunaan untuk usulan penghapusan.

Usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2024 telah dengan rincian: Rp120.720.000 untuk peralatan mesin yang diusulkan ke BSIP secara berjenjang dan Rp27.000.000 untuk kendaraan bermotor yang diusulkan ke KPKNL melalui aplikasi SIMAN dengan file terlampir

Gedung dan
Bangunan
Rp9.719.728.860

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.719.728.860 dan Rp9.719.728.860. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024, pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

Saldo Nilai 1 Januari 2024	9.719.728.860
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	9.719.728.860
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.482.936.260)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	8.236.792.600

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp105.017.825

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp105.017.825 dan Rp105.017.825 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	105.017.825
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	105.017.825
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(21.040.561)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	83.977.264

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp22.280.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.280.000 dan Rp22.280.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	22.280.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2024	22.280.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	22.280.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.351.473.446

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.351.473.446 dan Rp5.187.522.678. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4.028.862.111	(3.847.496.625)	181.365.486
2.	Gedung dan Bangunan	9.719.728.860	(1.482.936.260)	8.236.792.600
3.	Tanah	4.568.076.000	-	4.568.076.000
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.017.825	(21.040.561)	83.977.264
4.	Aset Tetap Lainnya	22.280.000	-	22.280.000
	Jumlah	18.443.964.796	(5.351.473.446)	13.092.491.350

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Lain-Lain
Rp147.720.000,

C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp147.720.000 dan Rp 88.825.000 Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	88.825.000
Mutasi tambah:	120.720.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	61.825.000
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	61.825.000
Saldo Per 31 Desember 2024	147.720.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(147.720.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp147.720.000

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp147.720.000 dan Rp147.720.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain	147.720.000	-147.720.000	0
Jumlah		147.720.000	-147.720.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

Kewajiban Jangka
Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah

Rp11.058.300

yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.058.300 dan Rp1.130.900

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp11.058.300

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.058.300 dan Rp1.130.900. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Berikut rincian utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	Uang Makan pegawai bulan Desember 2024	9.749.000
2.	Tagihan Listrik bulan Desember 2024	1.309.300
Total		11.058.300

Ekuitas
Rp13.081.926.050

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.081.926.050 dan Rp13.454.656.125; Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp1.020.000

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.020.000 dan Rp420.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.020.000.	420.000.	142,85
Jumlah	1.020.000.	420.000.	142,85

Pendapatan tersebut merupakan biaya atau sewa rumah dinas yang dibebankan kepada pegawai yang menempati rumah dinas selama tahun 2024. Rinciannya adalah:

Nama	Uraian	Tarif	Kuantitas	Jumlah
Raden Catur P	Sewa rumah dinas	85.000	12	1.020.000.

Terdapat selisih pendapatan pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp.3.715.000. selisih tersebut adalah:

- a. Pengembalian belanja pegawai senilai Rp2.800.000
- b. Penjualan BMN Peralatan dan Mesin senilai Rp1.000.000

*Beban Pegawai
Rp1.477.649.455*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.477.649.455 dan Rp1.322.115.329. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 20223

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.022.675.300.	924.568.600	10,61
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.858.	18.968	-11,12
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63.191.910.	57.196.150	10,48
Beban Tunj. Anak PNS	21.139.284.	20.448.301	3,38
Beban Tunj. Struktural PNS	25.920.000.	25.200.000	2,86
Beban Tunj. Fungsional PNS	93.640.000.	74.110.000	26,35
Beban Tunj. PPh PNS	6.400.423.	1.236.550	417,60
Beban Tunj. Beras PNS	58.225.680.	59.963.760	-2,90
Beban Uang Makan PNS	147.327.000.	131.493.000	12,04
Beban Tunjangan Umum PNS	12.935.000.	27.880.000	-53,60
Beban Uang Lembur	26.178.000.	0.	100,00
Jumlah	1.477.649.455.	1.322.115.329	11,76

Beban pegawai pada Semester II 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,76% dikarenakan terdapat Mutasi pegawai dari Balai karantina Pertanian Tanjungpinang sebanyak 1 orang, kenaikan gaji pokok tahun 2024 dan Beban uang lembur 2024. Selisih beban pegawai antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp9.749.000; berasal dari pembayaran belanja pegawai berupa uang makan bulan Desember 2024.

*Beban Persediaan
Rp16.139.550*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.139.550 dan Rp 41.217.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

**Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023**

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	16.139.550.00	15.682.900	2,91
Beban Persediaan Bahan Baku	0	25.535.000	(100,00)
Jumlah Beban	16.139.550.00	41.217.900	(60,84)

Beban persediaan pada Semester II tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 60,84%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembelian dan penggunaan barang persediaan pada tahun 2024 akibat pemblokiran anggaran kegiatan serta penerapan penatausahaan dokumen secara elektronik, yang secara signifikan mengurangi kebutuhan akan alat tulis kantor (ATK).

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.218.892.009*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa mengalami penurunan akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah pemblokiran anggaran, yang menyebabkan alokasi dana untuk barang dan jasa menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penggunaan barang konsumsi, seperti alat tulis kantor (ATK), juga menurun secara signifikan karena semakin banyak proses administrasi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan efisiensi yang diupayakan melalui digitalisasi. Di samping itu, perjalanan dinas dan rapat luar kota kini lebih sering digantikan oleh pertemuan daring, sehingga mengurangi kebutuhan akan biaya perjalanan dan akomodasi.

**Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023**

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	541.451.982	505.493.401	7,11
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	44.915.878	44.728.650	0,42
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	67.608.000	109.830.000	(38,44)
Beban Bahan	306.380.868	401.527.197	(23,70)
Belanja Honor Output Kegiatan	8.250.000	6.050.000	36,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	48.258.840	79.517.420	(39,31)
Beban Langganan Listrik	101.937.160	99.776.747	2,17
Beban Langganan Telepon	31.857.948	31.344.568	1,64
Beban Langganan Air	13.748.900	14.912.749	(7,80)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11.902.433	9.653.547	23,30
Beban Sewa	29.980.000	35.980.000	(16,68)
Beban Jasa Profesi	12.600.000	27.700.000	(54,51)
Jumlah Beban	1.218.892.009	1.366.514.279	(10,80)

Beban barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10,80% dibanding dengan tahun 2023. Beban barang dan jasa mengalami penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh refocusing

anggaran kegiatan serta pemblokiran sebagian anggaran pada komponen dukungan manajemen. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan prioritas anggaran sehingga berpengaruh pada pengeluaran barang dan jasa di berbagai kegiatan operasional. Selisih beban barang dan jasa antara LO dengan LRA senilai Rp174.800 adalah beban listrik bulan desember 2023 dan beban listrik bulan desember 2024. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban listrik desember 2024	1.309.300
2	Beban listrik desember 2023	1.130.900
	Total	178.400

Beban
Pemeliharaan
Rp400.849.951

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp400.849.951 dan Rp270.593.793. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.644.452.	104.479.835	98,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193.205.499.	166.113.958	16,31
Jumlah	400.849.951.	270.593.793	48,14

Beban pemeliharaan pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 48,14% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan yang cukup besar, seperti perbaikan instalasi kelistrikan pada gedung, perawatan rumah dinas yang kondisinya kurang layak, serta pemeliharaan berkala lainnya untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dengan baik.

Beban Perjalanan
Dinas Rp426.411.358

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp426.411.358 dan Rp889.401.372. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	421.161.358.	875.001.372	(51,87)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000.	14.400.000	(63,54)
Jumlah Beban	426.411.358.	889.401.372	(52,06)

Anggaran perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 52,06 persen akibat refocusing anggaran serta perubahan pola kerja yang semakin sering memanfaatkan teknologi daring untuk rapat dan pertemuan. Langkah ini mendukung efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang lebih modern dan hemat biaya.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
352.845.800

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp352.845.800 dan Rp454.047.120. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.450.949.	196.450.949	-
Beban Penyusutan Irigasi	1.926.166.	1.926.166	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.214.342.	1.214.342	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	153.254.343.	254.455.663	(39,772)
Jumlah Beban	352.845.800.	454.047.120	(22,289)

Kegiatan
operasional
Rp3.800.000

non

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.000.0000	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.800.000	9.190.000	100
Jumlah Beban	3.800.000	9.190.000	100

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp13.453.525.225

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.453.525.225 dan Rp13.935.808.045;

Defisit LO
Rp2.597.817.051

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp3.887.968.123 dan Rp4.334.279.793 Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp9.318.975

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.318.975 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah
1	Printer	3.258.330
2	Alat komunikasi Telepon Lainnya	953.980
3	Printer	2.210.000
4	Printer	1.026.665
5	Printer	1.870.000
Total		9.318.975

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Transaksi Antar Entitas Rp3.525.687.923

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.525.687.923 dan Rp3.851.996.973. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	3.530.507.923
Ditagikan ke Entitas Lain	(4.820.000)
Jumlah	3.525.687.923

*Ditagihkan ke
Entitas
Rp4.820.000*

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp4.820.000 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar Rp0*

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp13.081.926.050*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.081.926.050 dan Rp13.453.525.225.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Usulan Penghapusan senilai Rp120.720.000 Secara Berjenjang
2. Usulan Penghapusan kendaraan bermotor senilai Rp27.000.000 ke KPKNL
3. Reklas keluar dan masuk BMN senilai Rp117.389.500
4. Usulan PSP Ke KPKNL senilai Rp94.797.527

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU 320091

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,170,000	4,820,000	650,000	115.59	8,670,000	9,610,000	940,000	110.84
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,170,000	4,820,000	650,000	115.59	8,670,000	9,610,000	940,000	110.84
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	4,170,000	4,820,000	650,000	115.59	8,670,000	9,610,000	940,000	110.84
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,951,174,000	3,530,507,923	(420,666,077)	89.35	4,574,219,000	3,861,606,973	(712,612,027)	84.42
1. Belanja Pegawai	1,499,356,000	1,467,900,455	(31,455,545)	97.90	1,399,036,000	1,322,115,329	(76,920,671)	94.5
2. Belanja Barang	2,451,818,000	2,062,607,468	(389,210,532)	84.13	3,175,183,000	2,539,491,644	(635,691,356)	79.98
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU 320091

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,951,174,000	3,530,507,923	(420,666,077)	89.35	4,574,219,000	3,861,606,973	(712,612,027)	84.42
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KLASA PENGGUNA ANGGARAN

AHMAD TOHIR HARAHAP
NP 197911212011011007

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,020,000	420,000	600,000	142.857
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,020,000	420,000	600,000	142.857
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,020,000	420,000	600,000	142.857
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,477,649,455	1,322,115,329	155,534,126	11.764
Beban Persediaan	16,139,550	41,217,900	(25,078,350)	(60.843)
Beban Barang dan Jasa	1,218,892,009	1,366,514,279	(147,622,270)	(10.803)
Beban Pemeliharaan	400,849,951	270,593,793	130,256,158	48.137
Beban Perjalanan Dinas	426,411,358	889,401,372	(462,990,014)	(52.056)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	352,845,800	454,047,120	(101,201,320)	(22.289)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,892,788,123	4,343,889,793	(451,101,670)	(10.385)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,891,768,123)	(4,343,469,793)	451,701,670	(10.4)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,000,000	0	1,000,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,000,000	0	1,000,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,800,000	9,190,000	(6,390,000)	(69.532)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,800,000	9,190,000	(6,390,000)	(69.532)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,800,000	9,190,000	(5,390,000)	(58.651)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,887,968,123)	(4,334,279,793)	446,311,670	(10.297)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,887,968,123)	(4,334,279,793)	446,311,670	(10.297)

Keterangan :
FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025
Perangung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,453,525,225	13,935,808,045	(482,282,820)	(3.46)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,887,968,123)	(4,334,279,793)	446,311,670	(10.3)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(9,318,975)	0	(9,318,975)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(9,318,975)	0	(9,318,975)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,525,687,923	3,851,996,973	(326,309,050)	(8.47)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(371,599,175)	(482,282,820)	110,683,645	(22.95)
EKUITAS AKHIR	13,081,926,050	13,453,525,225	(371,599,175)	(2.76)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHMAD TOHIR HARAHAHAP

NIP. 197012212011011007

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	493,000	0	493,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	493,000	0	493,000	
ASET TETAP				
Tanah	4,568,076,000	4,568,076,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,028,862,111	4,149,582,111	(120,720,000)	(2.91)
Gedung dan Bangunan	9,719,728,860	9,719,728,860	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	105,017,825	105,017,825	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	22,280,000	22,280,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,351,473,446)	(5,110,028,671)	(241,444,775)	4.72
JUMLAH ASET TETAP	13,092,491,350	13,454,656,125	(362,164,775)	(2.69)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	147,720,000	88,825,000	58,895,000	66.30
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(147,720,000)	(88,825,000)	(58,895,000)	66.30
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	13,092,984,350	13,454,656,125	(361,671,775)	(2.69)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	11,058,300	1,130,900	9,927,400	877.83
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11,058,300	1,130,900	9,927,400	877.83
JUMLAH KEWAJIBAN	11,058,300	1,130,900	9,927,400	877.83
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,081,926,050	13,453,525,225	(371,599,175)	(2.76)
JUMLAH EKUITAS	13,081,926,050	13,453,525,225	(371,599,175)	(2.76)
JUMLAH EKUITAS	13,081,926,050	13,453,525,225	(371,599,175)	(2.76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,092,984,350	13,454,656,125	(361,671,775)	(2.69)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025

Pananggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AFHAMD TOHIR HARAHAHAP

NIP. 19 911212011011007

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:29 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	493,000	0
0.0	131111	Tanah	4,568,076,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,028,862,111	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,719,728,860	0
0.0	134112	Irigasi	57,785,000	0
0.0	134113	Jaringan	47,232,825	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,280,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,847,496,625
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,482,936,260
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	9,630,830
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,409,731
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	147,720,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	147,720,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	9,749,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,309,300
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,530,507,923
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,820,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	13,453,525,225
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,318,975	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,020,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,800,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,022,675,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,858	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63,191,910	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,139,284	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	93,640,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,400,423	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	58,225,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	147,327,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,935,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	26,178,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	541,451,982	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	44,915,878	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	67,608,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	306,380,868	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,250,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:29 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	48,258,840	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	101,937,160	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	31,857,948	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,748,900	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,902,433	0
3.0	522141	Beban Sewa	29,980,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	12,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207,644,452	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193,205,499	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	421,161,358	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	153,254,343	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196,450,949	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,926,166	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,214,342	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,139,550	0
JUMLAH			22,499,104,894	22,499,104,894

Keterangan :
FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AHMAD TOHIR HARAHAHAP
NIP 197911212011011007

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 2:22 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,530,507,923
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,820,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,020,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,800,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,022,675,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,856	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63,191,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	21,139,284	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	93,640,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,400,423	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58,225,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	137,578,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,655,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	26,178,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	541,451,982	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44,915,878	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	67,608,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	306,380,868	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,250,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	48,258,840	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,632,550	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	101,937,160	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	31,857,948	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	13,570,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,902,433	0
3.0	522141	Belanja Sewa	29,980,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207,644,452	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193,205,499	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	421,161,358	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	998
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	720,000
JUMLAH			3,536,048,921	3,536,048,921

Keterangan :
FINAL

Tanjungpinang, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANIMAD TOHIR HARAHAP
197811212011011007

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-14
Kementerian Negara/Lembaga : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Eselon 1 : 018.09 - BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Wilayah/Provinsi : 32.00 - KEPULAUAN RIAU/KEPULAUAN RIAU
Satuan Kerja : 320091 - BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 06-05-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	EKONOMI	3,951,174,000.00	3,531,228,921.00	89.37%							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	3,951,174,000.00	3,531,228,921.00	89.37%							
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	282,000,000.00	270,537,831.00	95.94%							
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	282,000,000.00	270,537,831.00	95.94%							
ADA	Standarisasi Produk	100,000,000.00	95,962,700.00	95.96%							
114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100,000,000.00	95,962,700.00	95.96%	1.0000	Standar	3.0000	100%	4.04%		
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	182,000,000.00	174,575,131.00	95.92%							
101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	182,000,000.00	174,575,131.00	95.92%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	4.08%		
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	250,000,000.00	245,897,117.00	98.36%							
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	250,000,000.00	245,897,117.00	98.36%							
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	250,000,000.00	245,897,117.00	98.36%							
101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	250,000,000.00	245,897,117.00	98.36%	6.0000	Unit	4.0000	95%	-3.36%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
WA	Program Dukungan Manajemen	3,419,174,000.00	3,014,793,973.00	88.17%							
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	3,419,174,000.00	3,014,793,973.00	88.17%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,048,070,000.00	2,855,113,555.00	93.67%							
956	Layanan BMN	44,536,000.00	18,909,982.00	42.46%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	57.54%		
962	Layanan Umum	212,760,000.00	91,136,188.00	42.84%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	57.16%		
994	Layanan Perkantoran	2,790,774,000.00	2,745,067,385.00	98.36%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.64%		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	371,104,000.00	159,680,418.00	43.03%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	208,746,000.00	82,782,108.00	39.66%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	60.34%		
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	46,731,000.00	21,370,087.00	45.73%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	54.27%		
955	Layanan Manajemen Keuangan	115,627,000.00	55,528,223.00	48.02%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	51.98%		